

TELEVISI REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI MEDIA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM 1977

TVRI AS A MEDIA FOR POLITICAL PROPAGANDA IN 1977 GENERAL ELECTION

. Oleh: Faqihuddien Abi Utomo, Prodi Ilmu Sejarah, Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, abi_fau@yahoo.com

Abstrak

Industri penyiaran televisi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan Negara. Kekuasaan Negara menjadi faktor penentu fungsi keberadaan industri penyiaran bagi masyarakat. Di Indonesia, pendirian Televisi Republik Indonesia tidak lepas dari kepentingan kekuasaan Negara, dalam hal ini pemerintah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Orde Baru memanfaatkan Televisi Republik Indonesia sebagai alat kampanye terselubung dalam Pemilihan Umum 1977. Metode yang digunakan yaitu penelitian sejarah kritis terdiri beberapa tahapan; heuristik, verifikasi, interpretasi, historiografi. Pesawat televisi dan siaran televisi berkembang di era Pemerintahan Soeharto. Hal ini membuat pemerintah merasa perlu untuk mengendalikan program acara yang ditayangkan untuk kepentingan pemerintah, yaitu mendukung pembangunan nasional dan memelihara stabilitas nasional. Peluncuran Satelit Komunikasi Satelit Domestik Palapa di tahun 1976, membuat siaran Televisi Republik Indonesia semakin menjangkau daerah pelosok di Indonesia. Semakin banyaknya penonton, dimanfaatkan oleh Pemerintah untuk mensosialisasikan hasil-hasil pembangunan. Menjelang Pemilihan Umum 1977, Departemen Penerangan membuat Rencana Operasi Penerangan Pemilu dengan tujuan agar Orde Baru kembali berkuasa. Televisi Republik Indonesia sebagai sebuah lembaga yang berada di bawah Deppen, mempunyai kewajiban melaksanakan Rencana Operasi Penerangan Pemilu 1977.

Kata kunci: Televisi Republik Indonesia (TVRI), Pemilihan Umum 1977, Kampanye

Abstract

Television broadcasting industry is inseparable from the power of the State and have been very detrimental on people's life. In Indonesia, the establishment of Televisi Republik Indonesia (TVRI) or Indonesian State-Owned TV Station, was designed under government total control. TVRI had been developing during the Soeharto's regime. The more TVRI penetrated wider audience, the more it had utilized by the New Order during the 1977 Election. This research is aiming to examine the New Order's political propaganda as part of their campaign to win the Election of 1977. The methods elaborated critical history approach, which incorporate heuristic, verification, interpretation, and historiography. Television appliances and broadcasting system was developing very rapidly within the Soeharto era. Such revolution has made the government felt the urge to control the content programming widely broadcasted to propagate government interests, including to support national development and to maintain national stability. The launched of 1976's Palapa Domestic Communication Satellite, had widen TVRI's coverage to remote areas across the nation. Government latter utilized the growing number of audiences to socialize the development outcome. Ahead of 1977 General Election, Department of Information was designing the Information Operations Plan or Rencana Operasi Penerangan (Renopen) of 1977 election that was aiming for striding New Order to regain their supremacy. TVRI as a public broadcasting company under the authority of Department of Information held the mandate to implement the Rencana Operasi Penerangan (Renopen) of 1977 election.

Keywords: Televisi Republik Indonesia (TVRI), 1977 General Election, Campaign

PENDAHULUAN

Industri penyiaran televisi tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan Negara. Kekuasaan Negara menjadi faktor penentu fungsi keberadaan industri penyiaran bagi masyarakat.¹ Di Indonesia, pendirian Televisi Republik Indonesia (TVRI) tidak lepas dari kepentingan kekuasaan Negara, dalam hal ini pemerintah. Sejak dimunculkan ide pendirian tahun 1952 oleh Maladi, tujuan TVRI tidak lepas dari kepentingan Pemerintahan Soekarno.

Dalam pengelolaan sebuah media, utamanya bagai pemberitaan, ada konsep yang disebut dengan framing. Konsep ini juga mempunyai tujuan, yaitu memobilisasi massa. Framing adalah pendekatan untuk melihat bagaimana realitas itu dibentuk dan dikonstruksi oleh media. Melalui framing, media menyajikan sebuah peristiwa dengan menekankan bagian tertentu, menonjolkan aspek tertentu, dan membesarkan cara bercerita tertentu dari suatu realitas/peristiwa.²

Melalui pendekatan framing, akan diketahui perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan/media ketika menseleksi isu dan menulis berita. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, dan hendak dibawa kemana berita tersebut.

Ada dua aspek framing, pertama, memilih fakta/realitas. Proses memilih fakta ini didasarkan pada asumsi bahwa media tidak mungkin melihat tanpa perspektif. Dalam memilih fakta, selalu terkandung dua kemungkinan: apa yang dipilih dan apa yang dibuang. Penekanan aspek tertentu itu dilakukan dengan memilih aspek tertentu, memilih fakta tertentu dan melupakan fakta yang lain, memberitakan aspek tertentu dan melupakan aspek lainnya.

Kedua, menuliskan fakta. Proses ini berhubungan dengan bagaimana fakta yang dipilih itu disajikan kepada khalayak. Gagasan itu diungkapkan dengan kata, kalimat dan proposisi apa, dengan bantuan aksentuasi foto dan gambar apa, dan sebagainya. Fakta yang sudah terpilih tersebut disajikan dengan penekanan perangkat-perangkat lain,

¹ Hermin Indah Wahyuni, *Televisi dan Intervensi Negara: Konteks Politik Kebijakan Publik Industri Penyiaran Televisi*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2000), hlm. 1

² Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi Ideologi, dan Politik*

Media, (Yogyakarta: LKiS, 2002) hlm. 78

seperti foto, video, atau kata-kata yang mendukung.³

Media massa memberikan pengaruh terhadap pengetahuan, penguatan sikap, keyakinan, dan predisposisi khalayak. Dalam pemilihan umum, media massa memberi pengaruh kuat terhadap pemilih. Pengaruh ini disebabkan adanya agenda setting, priming, dan framing dari media.⁴

Siaran TVRI terbatas di Pulau Jawa pada tahun 1970-an. 90,81% peawat televisi yang terdaftar ada di Pulau Jawa, dari jumlah tersebut setengahnya ada di Jakarta. Jumlah televisi yang terdaftar terus meningkat di tahun 1976 yaitu berjumlah 700.000 yang tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah kembali meningkat di tahun 1977 yaitu berjumlah 900.000 yang tersebar di seluruh Indonesia.

Persebaran televisi di pulau-pulau besar di Indonesia juga terus meningkat dari tahun 1975-1978. Di Pulau Jawa, jumlah meningkat 133%. Di Sumatera Utara meningkat 257%, Sumatera Barat

235%. Di Pulau Sulawesi meningkat 235%. Sedangkan di Pulau Kalimantan meningkat 165%.⁵

Berdirinya lima stasiun di berbagai daerah, seperti Yogyakarta, Medan, Makassar, Balikpapan, dan Palembang, menambah daya jangkauan siaran. Sampai tahun 1974, daya jangkauan TVRI menjadi 72.000 km², yang berarti meliputi 40,5 juta populasi.⁶

Berkembang pesatnya jangkauan televisi di masyarakat Indonesia, membuat Pemerintah Soeharto melalui Departemen Penerangan memanfaatkan sebagai alat penerangan. TVRI digunakan Soeharto dalam mensosialisasikan hasil kerjanya. Pengelolaan pemberitaan TVRI dikelola oleh Sub Direktorat Pemberitaan. Proses pembuatan berita, TVRI membuat siaran berita pembangunan yang menjadi landasan bagi Pemerintahan Soeharto.

Proses framing media bekerja disini. Bagaimana TVRI memberitakan

³*Ibid.*, hlm. 81

⁴ Pawito, *Komunikasi Politik: Media Massa dan Kampanye Pemilihan*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2009) hlm. 178

⁵ Philip Kitley, *Konstruksi Budaya Bangsa di Layar Kaca*, terj. Bambang Agung, dkk., (Jakarta: Institut Studi Arus Informasi dan Lembaga Studi Pers & Pembangunan, 2001), hlm. 50

⁶*Ibid.*, hlm. 65

hasil-hasil, dan segala kegiatan Presiden Soeharto.

Penelitian ini akan membahas mengenai sejarah Televisi Republik Indonesia (TVRI) yang dikuasai oleh Negara (Pemerintahan Soeharto). Soeharto melalui Departemen Penerangan membuat rencana penerangan/sosialisasi Pemilihan Umum 1977, salah satu media yang digunakan adalah TVRI. Ada target yang diemban oleh Departemen Penerangan, yaitu salah satunya memuluskan Orde Baru (Golkar) memenangkan kembali Pemilihan Umum.⁷

METODE PENELITIAN

Sejarah sebagai sebuah ilmu tentunya memiliki metode. Metode sejarah merupakan proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau.⁸ Metode sejarah digunakan sebagai cara tempuh untuk mencapai terselesaikannya suatu

⁷Departemen Penerangan Republik Indonesia, *Konsep Rencana Operasi Penerangan Pemilu 1977: Hasil Seminar Intern Deppen*, Jakarta 17 Januari 1975

⁸Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto, (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 36

penelitian atau proses rekonstruksi peristiwa masa lampau. Penelitian ini, penulis menggunakan metode sejarah, yaitu:

Heuristik(Pencarian Sumber)

Heuristik merupakan kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data-data, materi sejarah atau evidensi sejarah.⁹ Sumber merupakan hal yang paling penting dalam penyusunan karya sejarah. Tanpa adanya sumber peristiwa sejarah tidak akan dapat direkonstruksi menjadi sebuah kisah. Sumber yang digunakan dalam penulisan ini adalah sumber primer dan sumber sekunder.

I. Sumber Primer

Sumber primer adalah kesaksian seorang saksi dengan mata kepala sendiri atau saksi dengan panca indera yang lain, atau dengan alat mekanis seperti diktafon, yakni orang atau alat yang hadir pada peristiwa yang diceritakannya. Sumber tersebut dapat dibagi menjadi dua yakni, tertulis dan tidak tertulis. Sumber tertulis seperti, dokumen-dokumen, dan sumber tidak tertulis misalnya artefak. Serta sumber tidak tertulis adalah sumber lisan,

⁹ Helius Sjamsudin, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2007), hlm. 89.

dimana narasumber yang hidup sezaman pada masa peristiwa tersebut terjadi. Penelitian ini menggunakan sumber primer yang berasal dari Arsip Republik Indonesia (ANRI), seperti:

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 215 Tahun 1963, *Pembentukan Yayasan Televisi Republik Indonesia*, 20 Oktober 1963

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 217 Tahun 1963, *Pengangkatan Anggota Direksi Yayasan Televisi Republik Indonesia*, 20 Oktober 1963

Departemen Penerangan Republik Indonesia, *Konsep Rencana Operasi Penerangan Pemilu 1977: Hasil Seminar Intern Deppen*, Jakarta 17 Januari 1977

II. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber kedua setelah sumber utama atau sumber primer terpecahkan. Sumber sekunder adalah kesaksian saksi yang tidak hadir dalam peristiwa tersebut, seperti narasumber kerabat dekat pelaku utama atau saksi pada peristiwa tersebut, saksi sejarah dan para sejarawan, buku, catatan, benda, dan hal lainnya yang menyangkut peristiwa tersebut. Sumber sekunder yang penulis gunakan adalah:

Philip Kitley, *Konstruksi Budaya Bangsa di Layar Kaca*, terj. Bambang Agung, dkk., Jakarta: Institut Studi Arus Informasi dan Lembaga Studi Pers & Pembangunan, 2001

Alfian, Godwin C. Chu (editor), *Satellite Television in Indonesia*, Jakarta: LEKNAS/LIPI, 1981

Ishadi SK, *Media dan kekuasaan: Televisi di Hari-hari Terakhir Presiden Soeharto*, Jakarta: Buku Kompas, 2004

Verifikasi (Kritik Sumber)

Setelah sumber ditelusuri dan didapatkan, langkah selanjutnya adalah mengkritisi sumber tersebut. Agar sumber tersebut bisa dipakai dia harus melewati dua kali pemeriksaan, yaitu kritik eksternal dan kritik internal.¹⁰

Kritik eksternal dilakukan untuk mencari keabsahan data dengan melakukan penyaringan secara kritis. Menurut Kuntowijoyo tujuan kritik ekstern untuk menilai keabsahan sumber, misalnya jenis kertas, tinta, gaya tulisan,

¹⁰ R. Moh Ali, *Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia*, (Yogyakarta: LKIS, 2005), hlm. 246.

bahasa, kalimat, untuk mengetahui keaslian sumber.¹¹

Selain melakukan kritik ekstern peneliti juga melakukan kritik intern untuk mengetahui validitas isi sumber.¹² Kritik ini merupakan pemeriksaan terhadap isi sumber yang bertujuan untuk membuktikan apakah kesaksian dan pernyataan sumber dapat diandalkan atau tidak.¹³ Untuk mendapatkan pembuktian ini dapat ditempuh melalui dua cara. Pertama, mengetahui isi dari catatan selama perjalanan pelaku atau saksi. Kedua, mengetahui apakah sumber tersebut jujur atau tidak. Kedua hal ini begitu terasa penting ketika sumber itu menggunakan kata kiasan.

Interpretasi (Penafsiran)

Merupakan penafsiran atas fakta-fakta sejarah. Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk menafsirkan sumber, yaitu menggunakan model analisis dan menggunakan model sintesis.

¹¹Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Bentang, 1995), hlm. 101.

¹²*Ibid*, hlm. 102.

¹³*Ibid*, hlm. 135.

Historiografi (Penulisan)

Pada Historiografi atau penulisan sejarah adalah rekonstruksi masa lampau yang tersusun secara sistematis, bulat, dan jelas dalam bentuk cerita sejarah.¹⁴ Historiografi merujuk pada kegiatan menulis dengan menggunakan seluruh daya pikiran dan keterampilan teknis. Bentuk penulisannya bersifat diakrinis, yaitu menerangkan peristiwa dalam kurun waktu tertentu. Sebagai disiplin ilmu sejarah juga melihat sudut batasan waktu dan tempat.¹⁵ Pada akhirnya harus menghasilkan sintesis dari seluruh penelitiannya atau penemuannya itu dalam suatu penulisan utuh yang disebut historiografi.¹⁶ Penulisan ini akan memperhatikan sejarah Televisi Republik Indonesia sebagai media Orde Baru dalam meraih suara di Pemilihan Umum tahun 1977. Pokok pembahasan juga

¹⁴Helius Sjamsuddin dan H. Ismaun, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek Pendidikan Tenaga Akademik, 1996), hlm. 12.

¹⁵Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), hlm. 158.

¹⁶Helius Syamsudin, *op.cit.*, hlm.

akan melihat kebijakan-kebijakan Orde Baru dalam mengontrol Televisi Republik Indonesia.

PEMBAHASAN

Proses Pendirian Televisi Republik Indonesia

Ide agar Indonesia memiliki stasiun televisi sendiri dimulai sejak tahun 1952. Maladi, selaku menteri Penerangan, mendesak Soekarno agar Indonesia memiliki stasiun televisi. Menurutnya, televisi merupakan media yang tepat untuk menentukan simbol dan pembentukan jati diri Indonesia. Maladi juga beralasan dengan Indonesia mempunyai stasiun televisi sendiri, akan menguntungkan Soekarno dalam kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) pertama pada tahun 1955.¹⁷

Ide Maladi untuk mendirikan stasiun televisi di Indonesia sebenarnya didukung oleh Soekarno. Soekarno melihat televisi lebih efektif dibandingkan radio dalam hal berkomunikasi dengan rakyat. Sayangnya, walaupun Soekarno mendukung ide Maladi, menteri-menteri kabinet lain tidak setuju dengan ide tersebut. Alasannya

karena pendirian stasiun televisi memerlukan biaya yang banyak.¹⁸

Pada tahun 1959, Maladi sekali lagi mengusulkan kepada Soekarno untuk membangun stasiun televisi. Kali ini, Maladi mengedepankan Asian Games IV yang akan berlangsung di Jakarta sebagai argumennya.¹⁹ Maladi percaya bahwa liputan Asian Games melalui televisi akan membangkitkan nasionalisme dan kebanggaan bangsa yang sempat dikacaulaukan oleh federalism pada awal kemerdekaan Indonesia.

Persiapan dimulai sejak tahun 1961, yang digerakkan oleh panitia pendirian televisi. Panitia secara formal diundang rapat melalui keputusan menteri penerangan pada tanggal 25 Juli 1961. Panitia digerakkan di bawah arahan Menteri Penerangan saat itu, Maladi.²⁰ Melalui Keputusan Menteri Penerangan Nomor 20/SK/M/ 61 tanggal 25 Juli 1961, dibuatlah struktur Pembentukan Panitia Persiapan Televisi

¹⁸*Ibid.*, hlm. 26

¹⁹Hermin Indah Wahyuni, *op.cit.*, hlm. 31

²⁰Philip Kitley, *op.cit.*, hlm. 25

¹⁷Philip Kitley, *op.cit.*, hlm. 25

(P2TV).²¹ M. Sutarto, Direktur Perusahaan Film Negara ditunjuk sebagai ketuanya.²²

Siaran pertama TVRI yang mereka liput adalah Upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke 17 di Istana Negara. Acara ini berlangsung sekitar tiga setengah jam.²³

Setiap harinya, sejak tanggal 24 Agustus selama minimum satu setengah jam mengelola peristiwa-peristiwa di Asian Games. Jumlah jam ini meningkat menjadi lima belas jam pada tanggal 1 September.

Pendirian Yayasan Televisi Republik Indonesia

Pengolaan dana TVRI dirasa semakin rumit sejak tahun 1963. Pada bulan Maret 1963, TVRI secara rutin mulai mendapatkan pemasukan melalui iklan. Rumitnya pengolalan dan alokasi dana dari Yayasan Gelora Bung Karno, mendorong TVRI untuk mendirikan

yayasan mandiri. Melalui Keputusan Presiden No 215 tahun 1963, dibentuklah Yayasan Televisi Republik Indonesia.²⁴

Soekarno menginginkan TVRI menjadi media yang dapat membantu revolusi spiritual dan fisik Indonesia menurut yang masih pada taraf permulaan dan perkembangan. Sebagai satu-satunya stasiun televisi, TVRI juga berhak menentukan tipe alat-alat yang masuk dan beredar di Indonesia.²⁵ Era Soekarno, siaran TVRI bertujuan melaksanakan pembangunan mental/spirituil dan fisik dan menciptakan masyarakat Indonesia yang sosialis. Untuk mencapai tujuan tersebut, TVRI membuat program-program acara dalam bidang penerangan, pendidikan ilmu pengetahuan, keagamaan, keolahragaan, kesenian dan kebudayaan, dan hubungan kebudayaan antar Negara.²⁶

Struktur TVRI yang dibuat menyatakan jika Soekarno menetapkan bahwa dirinya adalah Pemimpin Umum, yang dibantu oleh Staf Presiden Urusan

²¹Hinca Panjaitan, *Memasung Televisi: Kontroversi Regulasi Penyiaran di Era Orde Baru*, (Jakarta: Institut Studi Arus Informasi, 1999), hlm. 2

²²Ishadi SK., *op.cit.*, hlm. 31

²³Philip Kitley, *op.cit.*, hlm. 30

²⁴*Ibid.*, hlm. 37

²⁵Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 215 Tahun 1963, *Pembentukan Yayasan Televisi Republik Indonesia*, 20 Oktober 1963

²⁶*Ibid.*

TVRI.²⁷ Dalam kegiatan sehari-hari, TVRI akan dipimpin oleh jajaran Direksi yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul staf presiden.

Televi Republik Indonesia Era Soerhato

Melalui TVRI, Soeharto menggunakannya sebagai alat untuk mencapai tujuan nasional. Secara garis besar ada tiga tujuan yang ingin dicapai lewat TVRI oleh Soeharto. Pertama, untuk mendukung persatuan dan integrasi nasional. Kedua, mendukung tercapainya pembangunan nasional. Ketiga, untuk mencapai stabilitas politik.²⁸

Untuk memperlancar TVRI sebagai media yang mendukung pembangunan nasional, pada tahun 1971 Departemen Penerangan mengeluarkan Surat Keputusan No. 54/B/KEP/MENPEN/1971 tentang Penyelenggaraan Siaran Televisi di Indonesia. Pemerintah memandang bahwa

dalam beberapa tahun kedepan, akan ada perkembangan pertelevisian yang bertambah pesat. Pemerintah harus menjamin berkembangnya televisi harus berintegrasi dengan pemerintah untuk menunjang pembangunan nasional.²⁹

Pedoman penyelenggaraan siaran TVRI mengatur ketentuan-ketentuan pokok yang harus dijadikan pedoman dalam melaksanakan siarannya. Salah satu tujuan TVRI sebagai media massa adalah mendukung pembangunan nasional. Melalui siarannya, TVRI harus mendorong masyarakat dengan memotivasi yang tepat untuk mensukseskan kebijaksanaan dan semua program pemerintah.³⁰

Sebagai alat komunikasi massa, TVRI harus dapat menampung pikiran dan pendapat masyarakat. Ide yang ditampung harus bersifat positif dan konstruktif untuk menciptakan kegairahan masyarakat dalam menunjang kebijakan program pemerintah. Di pedoman ini, yang menarik adalah adanya larangan untuk TVRI

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Godwin C. Chu, Taufik Abdullah, "Communication and Development: An Indonesian Experiment", dalam Alfian, Godwin C. Chu, ed., *Satellite Television in Indonesia*, (Jakarta: LEKNAS/LIPI, 1981), hlm 23

²⁹ Surat Keputusan Menteri Penerangan No. 54/B./KEP/MENPEN/1971, *Penyelenggaraan Siaran Televisi Di Indonesia*, 3 Mei 1971

³⁰ *Ibid.*

menyiarkan pendapat yang dapat mendiskreditkan pemerintah.

Aturan mengenai pelarangan menyiarkan pendapat yang dapat mendiskreditkan pemerintah, dapat dilihat bahwa Soeharto ingin memanfaatkan dan mengatur sedemikian rupa agar TVRI menjadi alat pendukung pemerintahan. TVRI juga ingin dijadikan sebagai alat propaganda pemerintah dengan dilarangnya melakukan kritik.

Program acara juga ditentukan dalam SK ini. Ada enam program acara yang harus disiarkan TVRI, yaitu acara penerangan, acara pendidikan, acara kanak-kanak, acara budaya, acara olahraga, dan hiburan secara umum.

Penonton TVRI dipandang sebagai sekumpulan massa yang harus diberi penerangan. Untuk itu, dalam perincian program acara berita penerangan, tujuannya untuk menjelaskan program pemerintah.³¹ Ini merupakan bukti lagi, sebagai media milik pemerintah, TVRI wajib menjadi media yang menjelaskan program pemerintah.

Televisi Republik Indonesia: Kampanye Terselubung Soeharto

Menghadapi tahun politik di 1977 Untuk itu, Deppen membuat Konsep Rencana Operasi Penerangan (Renopen) Pemilu 1977. Konsep ini sangat bermuatan politik bagi kekuatan Orde Baru dan Soeharto khususnya. Karena di dalamnya memuat langkah-langkah untuk mengamankan suara Orde Baru.

Cara yang digunakan untuk mengamankan dan mensukseskan Pemilu 1977 adalah memanfaatkan media yang ada di bawah Deppen. Sebagai satu-satunya saluran televisi yang ada di Indonesia, dan berada di bawah struktur Deppen, TVRI dijadikan sarana untuk mengamankan suara Orde baru dalam Pemilu 1977.

Ada lima materi yang dipersiapkan dalam rencana penerangan Pemilu. Kelima materi tersebut adalah:

1. Pancasila, Undang-undang Dasar 45, Garis-garis Besar Haluan Negara, dan TAP MPR 1973 yang ada hubungannya dengan Pemilu
2. Undang-undang Pemilu 1977, Peraturan Pemerintah dan Peraturan-peraturan pelaksanaan Pemilu
3. Pidato-pidato presiden, instruksi dan keputusan para menteri, peraturan/keputusan dari Lembaga Pemilu, yang berhubungan dengan pelaksanaan Pemilu

³¹ *Ibid.*

4. Hasil-hasil Pelita Peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan Pemerintah di Daerah³²

Renopen Pemilu 1977 dilakukan dalam empat tahap. Materi hasil pembangunan dari Repelita jilid I mendapatkan porsi yang besar. Dari tahap satu sampai empat, materi hasil pembangunan dan Repelita menjadi prioritas. Dengan memberi porsi yang besar tentang hasil pembangunan, diharapkan rakyat akan memilih Golkar dan Orde Baru akan memenangkan Pemilu 1977.

Dalam skedul rencana operasi penerangan, TVRI melaksanakan Renopen dalam tiga tahap. Tahap I dimulai bulan Maret 1975 dengan menrancang program-program serta bahan liputan terkait laporan pembangunan nasional. Laporan pembangunan adalah sebuah program acara di TVRI, yang berisikan liputan tentang pembangunan dan hasil pembangunan yang dilaksanakan Orde Baru. Program laporan pembangunan dalam skedul direncanakan mulai tayang

di TVRI pada Juni 1975.³³ Sampai selanjutnya, di tahun 1975, acara laporan pembangunan selalu tayang di TVRI.

Tahap II dimulai Januari 1976. Kegiatan utamanya adalah Pemilu. Materi yang ditayangkan mengenai pengumuman dalam siaran pemerintah mengenai Pemilu, aturan dan tata pelaksanaan Pemilu, serta lagu-lagu dan gending-gending mengenai Pemilu. Materi lainnya yang diliput adalah mengenai pengiriman barang-barang logistik untuk keperluan Pemilu. Selain melakukan sosialisai Pemilu, tahap ini juga tetap melakukan siaran-siaran laporan pembangunan di berbagai daerah.

Tahap III dimulai tahun 1977. Mendekati hari pemungutan suara, TVRI semakin intensif dalam menyiarkan laporan hasil pembangunan. Materi potongan video, laporan film pembangunan, laporan khusus pembangunan daerah dipersiapkan ketika mendekati pemungutan suara.

Tahap ini juga, kampanye melalui TVRI secara resmi dilakukan. Saat masa kampanye Pemilu dilaksanakan April –

³²Departemen Penerangan Republik Indonesia, *Konsep Rencana Operasi Penerangan Pemilu 1977: Hasil Seminar Intern Deppen*, Jakarta 17 Januari 1975, hlm. 4

³³Departemen Penerangan Republik Indonesia (1975), Lampiran B: Bidang Radio, Televisi, dan Film, *op.cit*

Maret, PPP, PDI, dan Golkar mendapat jatah lebih banyak yaitu dua kali tampil tiap bulannya.

Di masa kampanye Pemilu siaran laporan pembangunan tetap dilaksanakan. Siaran pembangunan seperti “kampanye bayangan” untuk Golkar dan Orde Baru, karena materi siarannya berupa hasil-hasil Pelita yang dilaksanakan Orde Baru. Walaupun mendapat kesempatan yang sama dengan kedua Parpol peserta Pemilu, Golkar mendapat keuntungan dengan siaran pembangunan.

Jika melihat jadwal acara TVRI pada Maret – April,³⁴ siaran laporan pembangunan menjadi program acara yang rutin ditayangkan. Acara laporan pembangunan tayang pada pukul 19.44 – 20.00 WIB hampir setiap hari. Pada bulan Maret, laporan pembangunan tayang sebanyak 20 kali di hari yang berbeda. Sedangkan bulan laporan pembangunan tayang semakin banyak, yaitu 28 kali di hari yang berbeda.

Di minggu tenang kampanye dan Pemilu, pada 26 Juni – 3 Juli, acara laporan pembangunan tetap

ditayangkan. Materi yang tayangkan tidak berkurang, tetap menyiarkan potongan video pembangunan, laporan pembangunan di berbagai daerah, dan film-film tentang pembangunan. Selain itu, juga disiarkan amanat Presiden Soeharto dalam menghadapi Pemilu.³⁵ Walaupun PPP, PDI, dan Golkar sudah tidak kampanye di TVRI, laporan pembangunan tetap menguntungkan Golkar dan Orde Baru.

KESIMPULAN

Dalam teori media, ada yang disebut dengan *Ideological State Apparatus*, yaitu kecenderungan media sebagai alat negara dalam mengembangkan tujuan ideologinya. Sejak awal ide pendirian, TVRI bertujuan politis bagi pemerintah. Di era Soekarno, TVRI ditujukan untuk membentuk masyarakat yang sosialis.

Di era Soeharto, TVRI ditujukan untuk membentuk pemahaman rakyat akan pembangunan nasional. Siaran TVRI harus mendukung pembangunan yang direncanakan. Pembangunan akan berjalan

³⁴ Jadwal acara mengacu pada *Kompas* Maret – April 1977

³⁵ Departemen Penerangan Republik Indonesia (1975), Lampiran B: Bidang Radio, Televisi, dan Film, *loc.cit.*

lancar jika tidak ada kritik, untuk itu TVRI dilarang menampilkan pendapat yang mendiskreditkan Pemerintahan Soeharto.

Semakin berkembangnya fasilitas penyiaran televisi, membuat TVRI mulai dilirik rakyat Indonesia. Hal ini dimanfaatkan Soeharto untuk untuk

mengamankan posisi dalam Pemilu 1977.

Melalui Deppen, dibuat strategi agar Golkar dapat kembali menang di Pemilu 1977. Untuk itu, dibuat Rencana Operasi Penerangan Pemilu 1977 yang bertujuan dimenangkannya suara Golkar dan Orde Baru kembali berkuasa.

Daftar Pustaka

Arsip

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 215 Tahun 1963, *Pembentukan Yayasan Televisi Republik Indonesia*, 20 Oktober 1963

Surat Keputusan Menteri Penerangan No.54/B/KEP/MENPEN/1971, *Penyelenggaraan Siaran Televisi Di Indonesia*, 3 Mei 1971

Departemen Penerangan Republik Indonesia, *Konsep Rencana Operasi Penerangan Pemilu 1977: Hasil Seminar Intern Deppen*, Jakarta 17 Januari 1977

Buku-buku:

Alfian, Godwin C. Chu, ed., *Satellite Television in Indonesia*, Jakarta: LEKNAS/LIPI, 1981

Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi Ideologi, dan Politik Media*, Yogyakarta: LKiS, 2002

Helius Sjamsuddin dan H. Ismaun, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek Pendidikan Tenaga Akademik, 1996

Helius Sjamsudin, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Ombak, 2007

Hermin Indah Wahyuni, *Televisi dan Intervensi Negara: Konteks Politik Kebijakan Publik Industri Penyiaran Televisi*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2000

Hinca Panjaitan, *Memasung Televisi: Kontroversi Regulasi Penyiaran di Era Orde Baru*, Jakarta: Institut Studi Arus Informasi, 1999

Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Bentang, 1995

, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta.: Tiara Wacana, 2003

Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto, Jakarta: UI Press, 2008

14 Prodi Ilmu Sejarah 2019

Pawito, *Komunikasi Politik: Media Massa dan Kampanye Pemilihan*, Yogyakarta: Jalasutra, 2009

Philip Kitley, *Konstruksi Budaya Bangsa di Layar Kaca*, terj. Bambang Agung, dkk., Jakarta: Institut Studi Arus Informasi dan

Lembaga Studi Pers & Pembangunan, 2001

R. Moh Ali, *Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia*, Yogyakarta: LKIS, 2005

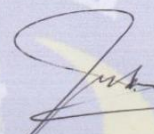
Pembimbing,



H.Y. Agus Murdiyastomo, M.Hum
NIP. 19580121 198601 1 001

Yogyakarta, 18 Februari 2019

Reviewer,



Danar Widiyanta, M.Hum
NIP. 196810101994031 001

